

BLH Akan Panggil RS Pencemar Sungai

KEPALA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok, Rahmat Subagio, akan memanggil 10 rumah sakit swasta di Kota Depok yang mencemari sungai. Sebab, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mereka miliki tidak bekerja sempurna. "Kita akan panggil 10 rumah sakit yang berperan aktif cemari sungai. Mereka akan kita kasih pengarahan. Kalau mereka tidak datang, maka akan diproses," katanya, Rabu (26/10).

Menurutnya, *output* IPAL di 10 rumah sakit tersebut mengandung kadar amonium (NH₄) dan Fosfat (PO₄) yang berada di atas baku mutu. Penemuan tersebut didapatkan berdasarkan uji IPAL yang dilakukan BLH ke 10 rumah sakit di Kota Depok, Januari- Juni 2011. "Penemuan ini merupakan hasil uji IPAL yang dilakukan BLH di seluruh rumah sakit di Kota Depok, Januari. Sekarang ini staf saya tengah menggodok surat panggilan tersebut," kata Rahmat.

Rahmat mengingatkan, standar baku mutu untuk ammonium yaitu 0,1 mg/L. Sementara standar baku untuk fosfat adalah 2 mg/L. Tingkat pencemaran setiap rumah sakit berbeda-beda kadarnya. Namun, umumnya mereka memiliki kadar NH₄ dan PO₄ yang berada di atas baku mutu. "Kami terus melakukan pemantauan dengan uji IPAL. Pemantauan dan uji IPAL dilakukan dua tahun sekali," tuturnya.

Dikatakan, untuk menindaklanjuti penemuan tersebut, BLH telah mengirimkan surat peringatan kepada 10 rumah sakit tersebut agar segera memperbaiki IPAL yang dimilikinya. Peringatan tersebut diberikan selama tiga kali. Bila setelah tiga kali diberi surat peringatan kondisi IPAL mereka belum diperbaiki, maka rumah sakit yang tetap melanggar akan disomasikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman denda Rp3 miliar-10 miliar dan atau kurungan tiga tahun. "Kita sudah pernah berperkara dengan RS Hermina di pengadilan. Kalau surat peringatan tersebut tidak digubris selama tiga kali, maka kita akan memaja-hijaukan mereka," katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Etty Nurhayati mengatakan, sanitasi dan masalah air bersih merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam bidang kesehatan. Namun masyarakat dan perusahaan cenderung mengabaikan bahaya proses pencemaran akibat sanitasi buruk yang memang membutuhkan waktu lama untuk bisa terlihat dampaknya.

Etty melanjutkan, dalam rangka meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan yang lebih baik diperlukan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Perilaku tidak sehat merupakan potensi yang buruk dalam mencemari air tanah. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk air perpipaan. "Penyakit demam berdarah dan kaki gajah muncul karena sanitasi yang tidak baik," katanya.